

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi menemukan bahwa berita dengan topik gangguan mental dinarasikan secara sensasional, seperti dikaitkan dengan tindakan kekerasan dan berbahaya (Aragonès et al., 2014; Gwarjanski & Parrott, 2017; Klin & Lemish, 2008; Liljeqvist et al., 2020; Subramanian, 2018). Hal ini terjadi di beberapa negara, seperti Spanyol, Amerika Serikat, Swedia, India, dan Indonesia. Klin dan Lemish (2008) menyatakan bahwa deskripsi gangguan mental dan penderitanya menyimpang karena adanya ketidakakuratan dan informasi yang berlebihan atau salah. Bahkan, media pun sering mengaitkan gangguan mental dengan gender sehingga terjadi bias, seperti menggambarkan laki-laki sebagai penderita gangguan mental dalam majalah-majalah populer dan diskusi tentang psikosis, gangguan kepribadian, dan masalah masa kanak-kanak (Klin & Lemish, 2008).

Pada 2015, sebanyak 8 portal berita populer di Amerika Serikat memproduksi artikel-artikel terkait gangguan mental jenis skizofrenia yang isinya didominasi oleh bingkai yang menstigmatisasi (Gwarjanski & Parrott, 2017). Bingkai stigma lebih sering muncul dibanding bingkai anti stigma pada berita gangguan mental (Gwarjanski & Parrott, 2017). Subramanian (2018) pun menemukan bingkai kekerasan yang mendominasi berita tentang gangguan mental memuat cerita tentang bunuh diri, individu dengan penyakit mental sebagai pelaku dan korban kejahatan dengan kekerasan, serta gangguan mental sebagai pembelaan kriminal. Media cenderung menekankan kekurangan dan kebutuhan penderita gangguan mental dengan menggambarkan para penderita sebagai individu yang layak memperoleh kasih sayang lebih dibandingkan masyarakat pada umumnya (Aragonès et al., 2014). Selain itu, studi sebelumnya menemukan bahwa media arus utama di Indonesia, seperti *Kompas.com* dan *Tempo.co* cenderung menggambarkan karakteristik individu orang dengan gangguan mental berbahaya bagi orang lain, gila, dan beban bagi kehidupan sosial (Izzati et al., 2023). Kedua media ini juga

lebih sedikit menggambarkan solusi medis pada artikelnya (Izzati et al., 2023). Gambaran solusi yang ditonjolkan cenderung pada perubahan perilaku dan gaya hidup (Izzati et al., 2023).

Di sisi lain, media mampu membantu mengurangi stigma dengan memuat informasi anti stigma, seperti menekankan pada proses pemulihan, keberhasilan pengobatan, dan mengangkat profil penderita gangguan mental (Aragonès et al., 2014; Gwarjanski & Parrott, 2017). Gwarjanski dan Parrott (2017) menemukan masih ada setidaknya satu dari lima artikel berita yang memuat informasi anti stigma mengenai skizofrenia seperti anekdot tentang keberhasilan pengobatan atau profil dari penderita gangguan mental. Penggunaan bingkai yang menstigmatisasi dalam sebuah berita dapat memengaruhi pembacanya pula. Cerita yang mengandung anti stigma memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk disertai dengan komentar-komentar yang menentang stigma dari pembaca (Gwarjanski & Parrott, 2017).

Media di negara-negara tertentu, seperti Jepang dan Inggris telah menerapkan narasi anti stigmatisasi dalam pemberitaan mereka (Suzuki et al., 2022; Thornicroft et al., 2013). Surat kabar di Inggris menunjukkan adanya perbaikan pada pemberitaan tentang gangguan mental pada 2009-2011 melalui peningkatan signifikan dalam proporsi artikel anti stigmatisasi, khususnya yang mengandung elemen dukungan kesehatan mental (Thornicroft et al., 2013). Pada penelitian ini, narasi anti stigmatisasi pada pemberitaan gangguan mental meliputi penggambaran yang simpatik, penyebab gangguan mental (genetik, psikososial), pemulihan atau pengobatan yang berhasil untuk gangguan mental (farmasi, psikososial), dan dukungan pada kesehatan mental (stigma, ketidakadilan, atau prevalensi) (Thornicroft et al., 2013). Perbaikan tersebut dijadikan sebagai panduan bagi wartawan serta editor dalam menulis laporan gangguan mental (Thornicroft et al., 2013).

Pada isu kesehatan Covid-19, media daring di Indonesia telah memuat berita untuk mengurangi stigma untuk mencapai tingkat sosio-ekologis, seperti kebijakan publik, organisasi, komunitas, interpersonal, dan individu (Widati et al., 2021).

Studi ini menemukan 105 berita memuat destigmatisasi atau mengurangi stigma yang dipublikasikan oleh 79 media daring pada 2020 (Widati et al., 2021). Studi ini menyatakan bahwa sebagian besar media yang memuat destigmatisasi adalah media milik negara, seperti pemerintah pusat, daerah, berbagai organisasi profesional, dan LSM (Widati et al., 2021). Sementara itu, sebagian besar yang memuat berita mengandung stigma adalah media komersial (Widati et al., 2021).

Studi lainnya menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendukung kesehatan mental remaja adalah memanfaatkan jurnalis dan berbagai media untuk menyampaikan informasi yang tepat, seperti mempromosikan dan mengadvokasi soal kesehatan mental (Kaligis et al., 2023). Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap masalah kesehatan mental remaja (Kaligis et al., 2023). Dalam penelitiannya, O'Brien (2021) menyatakan bahwa memahami kompleksitas gangguan mental, mempertahankan informasi yang relevan dengan cerita, sifat emosional dari masalah yang dibahas, dan stigma yang melekat membuat topik gangguan mental lebih sulit untuk diliput. Maka dari itu, pemahaman jurnalis mengenai gangguan mental, empati terhadap narasumber, dan sikap tidak menstigmatisasi menjadi faktor pendukung pemberitaan gangguan mental yang baik (O'Brien, 2021; Subramanian, 2014).

Sikap jurnalis terhadap panduan pelaporan berita berkontribusi pada berita yang mereka hasilkan. Para ahli dan organisasi seperti WHO telah mengembangkan serta menyebarluaskan panduan bagi media untuk melaporkan kasus bunuh diri yang bertanggung jawab (Markiewitz et al., 2020). Subramanian (2014) menemukan bahwa jurnalis memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap panduan media untuk memberitakan gangguan mental. Beberapa jurnalis setuju dengan panduan penggunaan istilah "individu dengan gangguan mental" dibandingkan "sakit jiwa" karena istilah tersebut menekankan kekurangan atau kelainan pada penderita gangguan mental yang dapat menimbulkan stigma (Subramanian, 2014). Organisasi media pun turut memengaruhi bagaimana jurnalis menghasilkan berita tentang gangguan mental. Para jurnalis yang memenangkan penghargaan atas laporan tentang gangguan mental memperoleh dukungan dari

editor yang bersedia memberi ruang dan waktu untuk menceritakan laporan mereka secara komprehensif (Subramanian, 2014).

Dalam proses penyusunan berita dengan topik gangguan mental terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas pemberitaannya (Holland, 2017; O'Brien, 2021; Subramanian, 2014). Dalam penelitiannya, O'Brien (2021) menyatakan bahwa memahami kompleksitas gangguan mental, mempertahankan informasi yang relevan dengan cerita, sifat emosional dari masalah yang dibahas, dan stigma yang melekat membuat topik gangguan mental lebih sulit untuk diliput. Panduan media juga memiliki kemungkinan bertentangan dengan keinginan jurnalis untuk menggunakan ruang publik dan menimbulkan kesulitan dalam melaporkan sesuai dengan panduan (Holland, 2017; Markiewitz et al., 2020).

Sayangnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Gwarjanski dan Parrott (Gwarjanski & Parrott, 2017), artikel dengan bingkai yang menstigmatisasi masih lebih mendominasi dibandingkan dengan artikel anti stigma (Gwarjanski & Parrott, 2017). Penelitian yang dilakukan Klin dan Lemish (Klin & Lemish, 2008) juga menunjukkan bahwa representasi gangguan mental yang mengungkapkan informasi dengan dilebih-lebihkan, tidak akurat, dan mendeskripsikan sifat penderitanya pada kekerasan serta berbahaya dapat mendukung klaim bahwa media massa berkontribusi terhadap langgengnya stigma gangguan mental, penderitanya, layanan kesehatan, dan para perawatnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas bagaimana media menggambarkan gangguan mental dan penderitanya menggunakan metode studi deskriptif kuantitatif (Aragonès et al., 2014; Gwarjanski & Parrott, 2017; Izzati et al., 2023; Suzuki et al., 2022; Thornicroft et al., 2013). Namun, penelitian dengan metode kuantitatif terbatas karena pesan tidak dapat dianalisis secara mendalam sehingga sulit untuk memperoleh gambaran situasi yang lebih lengkap (Aragonès et al., 2014) dan mencakup proses produksi gambar serta analisis pesan yang terkandung dalam gambar (Klin & Lemish, 2008). Penelitian terdahulu juga telah menunjukkan bahwa dukungan dari organisasi media, pemahaman terhadap gangguan mental, sikap jurnalis, dan panduan meliput gangguan mental dan bunuh

diri berkontribusi pada kualitas pemberitaan (Holland, 2017; Markiewicz et al., 2020; O' Brien, 2021; Subramanian, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Subramanian (2018) juga berkontribusi untuk memahami bagaimana bingkai stigma dan anti stigma terhadap gangguan mental dikonstruksi oleh media. Dari penelitian-penelitian tersebut, terlihat ada celah untuk penelitian selanjutnya terkait pembingkai yang dilakukan oleh media sebagai upaya destigmatisasi terhadap gangguan mental. Maka dari itu, penelitian selanjutnya akan menganalisis bagaimana media, khususnya di Indonesia menerapkan destigmatisasi terhadap gangguan mental melalui artikel-artikelnya.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 Konstruksi Realitas di Media

Kehidupan sehari-hari menampilkan sebuah realitas yang diinterpretasikan oleh manusia dan secara subyektif bermakna sebagai dunia yang koheren (Berger & Luckmann, 1991). Menurut Berger dan Luckmann (1991), realitas adalah kualitas yang melekat pada fenomena yang memiliki keberadaan independen dari kehendak kita sendiri. Realitas dikonstruksi melalui interaksi sosial. Konstruksi sosial atas realitas merupakan suatu proses dialektika di mana manusia bertindak sebagai pencipta sekaligus produk pada dunia sosialnya (Adoni & Mane, 1984). Manusia berinteraksi dengan orang lain dan akan terus memberikan pesan dan kesan, mendengarkan, mengamati, mengevaluasi, serta menilai situasi berdasarkan cara mereka disosialisasikan (Dharma, 2018). Realitas harus dibentuk dan diinterpretasikan oleh manusia sebagai aktor melalui media (McQuail & Deuze, 2020).

Menurut McQuail dan Deuze (2020), konstruksi sosial adalah sebuah proses di mana peristiwa, individu, nilai-nilai dan ide-ide pertama kali ditafsirkan dengan cara tertentu dan diberi nilai serta prioritas yang sebagian besar terjadi karena pengaruh media massa. Dalam hal ini, konsep *framing* dan *schemata* berperan penting (McQuail & Deuze, 2020). Tingkat pengaruh media terhadap konstruksi realitas subjektif individu tergantung pada banyaknya pengalaman langsung individu tersebut terhadap berbagai fenomena dan

seberapa banyak mereka mengandalkan media untuk memperoleh informasi terkait fenomena tersebut (Adoni & Mane, 1984).

Framing sebagai teori komunikasi massa mengacu pada cara media atau komunikator profesional mengemas dan menyajikan informasi kepada publik dengan menyorot peristiwa tertentu serta menempatkannya dalam suatu konteks (DeFleur & DeFleur, 2022). Teori *framing* dikembangkan secara lebih luas oleh Erving Goffman dan diterapkan oleh ahli-ahli lainnya pada komunikasi massa serta produksi berita (DeFleur & DeFleur, 2022). Menurut Gaye Tuchman (dalam DeFleur & DeFleur, 2022), *frame* menyertakan beberapa informasi dan mengecualikan informasi lainnya sehingga organisasi berita secara aktif berpartisipasi dalam konstruksi sosial atas realitas dan penyebaran realitas tersebut.

Konsep *framing* secara konsisten menawarkan cara untuk menggambarkan kekuatan teks yang berkomunikasi, karena teks mampu membuat informasi menjadi lebih menonjol melalui penempatan, pengulangan, atau dengan mengasosiasikan simbol-simbol budaya yang familiar (Entman, 1993). Menurut Entman (1993) *framing* merujuk pada memilih beberapa aspek realitas dan menjadikannya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan untuk mendorong definisi masalah tertentu (*define problems*), penafsiran sebab akibat (*diagnose causes*), evaluasi moral (*moral judgements*), dan rekomendasi penanganan terhadap hal yang dideskripsikan (*suggest remedies*). Bingkai menyorot informasi mengenai suatu hal yang menjadi subjek komunikasi sehingga informasi lebih nyata, bermakna, dan mudah diingat bagi audiens (Entman, 1993).

Framing memiliki empat elemen dalam proses komunikasi, yaitu komunikator, teks, penerima, dan budaya (Entman, 1993). Komunikator berfungsi memutuskan apa yang akan dikatakan. Teks berisi bingkai-bingkai yang diwujudkan dengan kata kunci tertentu, frasa, gambar stereotip, sumber informasi, dan kalimat yang memberikan kumpulan fakta atau penilaian yang memperkuat secara tematis. Kemudian, budaya merupakan serangkaian

kerangka umum yang dapat dibuktikan secara empiris dalam wacana dan pemikiran sebagian besar orang dalam suatu kelompok sosial. Dari keempat elemen tersebut terdapat fungsi serupa, yakni pemilihan dan penyorotan, dan penggunaan elemen untuk membangun argumen tentang masalah dan penyebabnya, evaluasi, dan/atau solusinya (Entman, 1993).

Framing dalam media berita dipandang sebagai alat kognitif yang digunakan dalam proses *encoding*, *interpreting*, dan mengambil informasi (Pan & Kosicki, 1993). Oleh karena itu, *framing* dapat dikaji sebagai strategi untuk mengonstruksi dan mengolah wacana berita atau sebagai karakteristik dari wacana itu sendiri (Pan & Kosicki, 1993). Menurut Pan dan Kosicki (1993), analisis *framing* dilakukan sebagai pendekatan konstruktivis untuk menelaah wacana berita dengan fokus pada mengonseptualisasikan teks berita ke dalam dimensi yang dapat dioperasionalkan secara empiris melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Bingkai media mengacu pada cara pers mengatur dan mengemas sebuah peristiwa menjadi sebuah berita (DeFleur & DeFleur, 2022). DeFleur (2022) menyatakan bahwa jurnalis menyorot aspek-aspek tertentu dari sebuah isu dan menjadikannya lebih menonjol sehingga memberikan kesan dan mendorong interpretasi tertentu kepada khalayak mengenai penyebab dan solusi yang direkomendasikan. Selain itu, ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan *frame* yang digunakan dalam menulis berita, diantaranya tekanan organisasi, keterbatasan waktu dan sumber daya, dan praktik dalam redaksi, nilai-nilai profesi jurnalisme dan komunitas tempat bekerja, dan orientasi ideologis atau politik jurnalis (DeFleur & DeFleur, 2022). Pengaruh lainnya juga bisa berasal dari kelompok elit, seperti pejabat atau lembaga pemerintah, kelompok kepentingan, dan aktor politik lainnya untuk mendukung kepentingan mereka (DeFleur & DeFleur, 2022).

2.2.2 Jurnalisme Kesehatan dan Isu Gangguan Mental

Komunikasi kesehatan secara esensial terkait dengan jurnalisme kesehatan (Asteria, 2014). Jurnalisme kesehatan merupakan aktivitas peliputan

atau pengumpulan informasi yang menghasilkan produk jurnalisme berupa tulisan maupun foto jurnalistik terkait informasi kesehatan (Asteria, 2014). Asteria (2014) juga menyatakan bahwa jurnalisme kesehatan tidak hanya menyajikan informasi mengenai pengobatan saja, tetapi juga terkait pencegahan, pemeliharaan, dan pengobatan dengan perilaku yang sehat.

Pemberitaan terkait isu kesehatan oleh media mampu memengaruhi khalayak umum, pembuat kebijakan, dan layanan kesehatan (Keshvari et al., 2018; Larrison et al., 2003). Peran reporter kesehatan pun dipandang sebagai orang yang menyebarkan informasi medis dan kesehatan secara akurat kepada masyarakat awam (Holland, 2017). Namun, nyatanya sebuah penelitian menemukan sebanyak 32,2 persen jurnalis tidak memahami isu kesehatan dan sebanyak 53 persen menyatakan pemahaman mereka terhadap istilah serta ekspresi kesehatan di bawah rata-rata (Keshvari et al., 2018). Terdapat sejumlah hambatan dalam praktik jurnalisme kesehatan, diantaranya kurangnya waktu, ruang, dan pengetahuan, persaingan dalam memperoleh audiens, kesulitan dengan terminologi, masalah dalam menemukan dan menggunakan sumber, serta masalah dengan editor dan komersialisme (Larrison et al., 2003).

Media berita khususnya surat kabar merupakan salah satu sumber informasi kesehatan mental yang paling sering diidentifikasi (Stuart, 2006). Secara konsisten dari waktu ke waktu, liputan media terkait gangguan mental cenderung bersifat negatif dan seringkali tidak akurat (Sieff, 2003). Media membentuk opini dan prasangka dengan penggunaan gambaran negatif secara berulang terhadap orang dengan gangguan mental, profesional dan perawatan kesehatan mental sehingga muncul stigma dan diskriminasi (Stuart, 2006). Stuart (2006) menyatakan bahwa media terbukti menggambarkan gangguan mental dengan dramatis dan menyimpang, seperti menekankan bahaya, kriminalitas, serta ketidakpastian. Media juga memberikan contoh reaksi negatif terhadap orang dengan gangguan mental, seperti rasa takut, penolakan, dan cemoohan (Stuart, 2006). Penggambaran terhadap gangguan mental oleh media pada akhirnya memiliki implikasi besar terhadap para pengidapnya,

seperti citra diri, perilaku mencari bantuan dan pemulihan, rasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, menghadapi intoleransi dari masyarakat, serta kekurangan dukungan (Stuart, 2006).

International Classification of Disease 11th Revision menyatakan bahwa gangguan mental adalah sindrom yang ditandai dengan gangguan signifikan secara klinis pada kognisi, regulasi, emosi, atau perilaku seseorang (World Health Organization, 2022). Berdasarkan data dari World Health Organization (2022) pada 2019, sebanyak 970 juta orang di dunia mengalami gangguan mental. Akibat pandemi Covid-19, jumlah orang dengan gangguan kecemasan dan depresi pada 2020 meningkat signifikan sebesar 26 persen dan 28 persen dalam satu tahun.

Di Indonesia, isu gangguan mental menjadi salah satu masalah serius. Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk atau sekitar 20 persen populasi (Sehat Negeriku, 2021). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi (Sehat Negeriku, 2021). Selain itu, pada 2022, Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey melaporkan sebanyak 34,9 persen atau 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir dan 5,5 persen atau 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir (Center for Reproductive Health et al., 2022). Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia.

Indonesia memiliki pedoman dalam menangani masalah kesehatan mental yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini menjadi dasar kebijakan penanganan kesehatan mental di Indonesia yang fokus pada peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat serta pencegahan gangguan jiwa bagi masyarakat yang rentan atau beresiko (Ayuningtyas et al., 2018). Upaya kesehatan jiwa dilakukan dengan

menyediakan sistem layanan kesehatan jiwa berjenjang dan komprehensif, menetapkan sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, teknologi, dan pendanaannya (Ayuningtyas et al., 2018). Namun, tidak semua orang dengan masalah gangguan jiwa mampu memperoleh pengobatan yang seharusnya akibat belum semua provinsi di Indonesia memiliki rumah sakit jiwa (Sehat Negeriku, 2021). Tak hanya itu, sumber daya manusia pun untuk tenaga kesehatan jiwa pun masih kurang. Pada 2021, jumlah psikiater sebagai tenaga profesional untuk pelayanan kesehatan jiwa hanya mencapai 1.053 orang yang artinya hal ini menjadi hambatan besar dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Indonesia. (Sehat Negeriku, 2021).

2.2.3 Destigmatisasi

Destigmatisasi dapat memberikan pengaruh bagi kelompok yang terstigmatisasi. Proses destigmatisasi dilakukan untuk menutup kesenjangan dalam nilai dan keanggotaan budaya antar kelompok (Lamont, 2018). Konstruksi budaya baru dari kelompok yang terstigmatisasi memiliki kemungkinan akan membentuk stigma publik dan struktural yang berdampak pada kesehatan (Clair et al., 2016). Mendefinisikan ulang kelompok yang terstigmatisasi dapat meningkatkan keyakinan dan sikap di antara orang-orang yang potensial menjadi pelaku stigmatisasi (Clair et al., 2016). Upaya tersebut memungkinkan interaksi yang lebih positif antara kelompok yang terstigmatisasi dan non-terstigmatisasi sehingga dapat mengurangi penilaian rendah dan diskriminasi (Clair et al., 2016).

Para aktor sosial, terlebih media atau jurnalis turut berkontribusi pada destigmatisasi. Berbagai konstruksi budaya digunakan oleh aktor sosial dalam upaya destigmatisasi (Clair et al., 2016), diantaranya

1. Menghilangkan kesalahan atau tuduhan
2. Menekankan kesetaraan
3. Menegaskan nilai kelompok, identitas, dan praktiknya
4. Advokasi legislasi mengenai hak dan perlindungan
5. Advokasi kebijakan organisasi

6. Memberikan kesaksian dan bukti untuk perubahan institusional

Konstruksi yang dilakukan untuk menghilangkan rasa bersalah bertujuan untuk menentang stereotip dan mengurangi penilaian negatif terhadap kondisi kelompok tersebut (Clair et al., 2016). Sementara itu, konstruksi yang dilakukan untuk menekankan kesetaraan fokus pada menyorot persamaan antara kelompok yang berbeda sebagai upaya mengurangi pemisahan atau pembentukan jembatan antara batas kelompok (Clair et al., 2016).

Selain itu, menurut Lamont (2018), terdapat tiga langkah penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap masyarakat dan mengupayakan kebijakan serta praktik inklusif terhadap kelompok yang terstigmatisasi, diantaranya meningkatkan keyakinan dan sikap melalui lembaga serta interaksi informal; membangun citra positif terhadap kelompok dan perilaku antar individu yang terstigmatisasi; dan memberikan dukungan terhadap undang-undang serta kebijakan yang mendorong partisipasi kelompok tersebut.

2.2.4 Jurnalisme Digital dan Media Alternatif

Dunia jurnalisme telah mengalami perubahan setelah memasuki era digital. Informasi yang dulu hanya bisa diakses melalui media konvensional, seperti surat kabar, majalah, televisi, dan radio saja, kini telah beralih ke dunia digital atau *online*. Transformasi ini pun turut memengaruhi seluruh aspek praktik profesional dan budaya jurnalisme dalam ruang redaksi, bidang akademik studi jurnalisme, organisasi, struktur, pendanaan, sumber daya manusia, regulasi, dan produk jurnalisme (Franklin & Canter, 2019). Selain itu, kehadiran internet, perangkat lunak yang semakin canggih, keterjangkauan Web 2.0, *blog*, *smartphone*, tablet, media sosial, algoritma, bot berita, *live streaming*, dan *artificial intelligence* mendukung laju transformasi dari media konvensional ke media dan jurnalisme digital semakin cepat (Franklin & Canter, 2019). Franklin dan Canter (2019) menyatakan bahwa internet telah mengubah kerangka kerja komunikasi sekaligus menghasilkan sumber berita dan opini yang sangat beragam serta plural.

Jurnalisme digital turut menghadirkan media alternatif yang memiliki sudut pandang berbeda dari media arus utama. Media alternatif mengutamakan jurnalisme yang erat dengan tanggung jawab sosial, menggantikan ideologi objektivitas dengan advokasi terbuka dan praktik oposisi (Atton, 2003). Maka dari itu, Atton (2003) menyatakan bahwa hadirnya media alternatif dianggap sebagai tantangan radikal terhadap praktik media konvensional yang sudah profesional dan terlembaga. Pada praktiknya, jurnalisme alternatif menekankan agenda berita, menggunakan dan merujuk sumber berita, serta mencari audiens yang berbeda (Franklin & Canter, 2019).

Berita-berita yang disajikan oleh media alternatif bersifat kontra hegemonik, memiliki narasi serta interpretasi alternatif, bersifat radikal secara politik, sosial, atau budaya (Holt et al., 2019). Hal ini selaras dengan VICE Indonesia yang berkomitmen untuk menyajikan liputan dengan beragam perspektif, mengandung opini yang mendobrak standar kelaziman, keberpihakan pada kelompok marjinal, dan mengusung tema-tema yang dipandang sebelah mata (VICE, 2018). VICE Indonesia cenderung meliput individu atau kelompok yang jarang tersorot, seperti komunitas LGBT, perempuan spesialis cambuk di Aceh, orang dengan gangguan mental yang dipasung, translator K-Pop, dan masih banyak lagi. Selain itu, jurnalisme alternatif cenderung mengatur produksi editorial dengan cara yang lebih demokratis dan inklusif, memiliki model bisnis yang unik, serta mengambil sikap editorial yang kritis terhadap otoritas dan struktur politik yang sudah mapan (Franklin & Canter, 2019; Harcup, 2011).

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A